



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 10 Tahun
2024 Vol 3 , No 2 .

PENERAPAN NILAI-NILAI MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM ERA DIGITAL: ANALISIS KONFLIK SOSIAL MEDIA BERDASARKAN PERSPEKTIF PANCASILA

Hanny Agustin¹⁾, Achmad Akmaluddin²⁾
Universitas Bina Darma

Email : hannyagustin16@gmail.com¹⁾, achmad28akmaluddin0470@gmail.com²⁾

Abstract (English)

The digital transformation has brought fundamental changes to the dynamics of social interaction and conflict management in Indonesian society. This research analyzes the application of deliberation and consensus values in the digital context, particularly in managing social media conflicts, through the perspective of Pancasila. Using a qualitative approach with content analysis and non-participatory digital observation, the research was conducted from October 2023 to March 2024. The results show that integrating deliberation and consensus values with digital technology through the "Digital Musyawarah 4.0" framework contributes significantly to reducing polarization levels and improving online discussion quality. The implementation of AI-based moderation systems, tiered consensus mechanisms, and digital reputation systems proves effective in handling digital conflicts. This research provides practical recommendations for developing a digital ecosystem that supports deliberation and consensus, including strengthening technological infrastructure, digital literacy programs, and relevant regulations.

Abstrak (Indonesia)

Transformasi era digital telah membawa perubahan fundamental dalam dinamika interaksi sosial dan penanganan konflik di masyarakat Indonesia. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam konteks digital, khususnya dalam penanganan konflik media sosial, melalui perspektif Pancasila. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten dan observasi digital non-partisipatif, penelitian dilakukan selama periode Oktober 2023 hingga Maret 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai musyawarah mufakat dengan teknologi digital melalui framework "Digital Musyawarah 4.0" berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat polarisasi dan meningkatkan kualitas diskusi online. Implementasi sistem moderasi berbasis AI, mekanisme konsensus bertingkat, dan sistem reputasi digital terbukti efektif dalam penanganan konflik digital. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis bagi pengembangan ekosistem digital yang mendukung musyawarah mufakat, termasuk penguatan infrastruktur teknologi, program literasi digital, dan regulasi yang relevan.

Article History

Received: 7 November 2024
Reviewed: 13 November 2024
Published: 14 November 2024

Keywords

Digital Deliberation, Social Media Conflict, Pancasila

Sejarah Artikel

Received: 7 November 2024
Reviewed: 13 November 2024
Published: 14 November 2024

Kata Kunci

Musyawarah Digital, Konflik Media Sosial, Pancasila

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa transformasi fundamental dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi, termasuk dalam konteks bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah menciptakan ruang publik virtual yang menjadi arena diskusi, perdebatan, dan bahkan konflik sosial. Menurut penelitian (Pratama, 2023), sekitar 89% masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial dengan rata-rata waktu penggunaan mencapai 3,5 jam per hari. Intensitas interaksi yang tinggi di ruang digital ini tidak jarang memunculkan polarisasi dan pertentangan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai musyawarah mufakat yang telah



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

*Bulan, 10 Tahun
2024 Vol 3 , No 2 .*

mengakar dalam budaya Indonesia. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika (Nurhalim dan Wijaya, 2022) melaporkan peningkatan signifikan kasus ujaran kebencian dan konflik horizontal di media sosial sebesar 65% dalam dua tahun terakhir. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya prinsip musyawarah mufakat, dengan realitas interaksi digital masyarakat Indonesia. Di sisi lain, media sosial juga menyimpan potensi besar sebagai wadah deliberasi publik yang konstruktif, sebagaimana diungkapkan dalam studi (Widodo, 2024) yang mendemonstrasikan keberhasilan beberapa komunitas virtual dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan musyawarah digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan krusial: Bagaimana implementasi nilai-nilai musyawarah mufakat dapat dioptimalkan dalam penanganan konflik di media sosial? Apa saja tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam interaksi digital? Bagaimana strategi yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai tradisional musyawarah dengan karakteristik komunikasi di era digital? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam konteks digital, khususnya dalam penanganan konflik di media sosial. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola-pola konflik digital, mengkaji relevansi dan adaptabilitas prinsip musyawarah mufakat dalam konteks modern, serta merumuskan framework penyelesaian konflik digital berbasis Pancasila.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Pancasila dalam konteks digital, memperkaya diskursus tentang transformasi nilai-nilai tradisional ke dalam era modern, dan memberikan perspektif baru dalam studi resolusi konflik digital. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi media sosial, panduan bagi pengelola komunitas virtual dalam mengelola konflik, serta referensi bagi masyarakat umum dalam berinteraksi di ruang digital. Transformasi nilai musyawarah mufakat ke dalam konteks digital memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik kedua domain tersebut. Sebagaimana diungkapkan (Sulistiyowati, 2023), musyawarah mufakat merupakan manifestasi demokrasi deliberatif yang menekankan pada pencapaian konsensus melalui dialog dan pertimbangan bersama. Dalam konteks digital, prinsip ini menghadapi tantangan unik karena karakteristik media sosial yang cenderung mendorong respon cepat dan komunikasi yang terfragmentasi. (Rianto dan Kusuma, 2024) dalam penelitiannya mengidentifikasi tiga aspek kritis dalam penerapan musyawarah digital: 1) *Asynchronous deliberation*, di mana peserta diskusi tidak harus hadir secara bersamaan namun tetap dapat berkontribusi secara bermakna; 2) *Digital facilitation*, yang melibatkan penggunaan tools dan platform digital untuk memfasilitasi proses musyawarah; dan 3) *Inclusive participation*, yang memastikan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam proses deliberasi digital.

Analisis konflik media sosial dari perspektif Pancasila mengungkapkan bahwa sebagian besar pertentangan berakar pada kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai fundamental bangsa. (Dharmaputra, 2023) menyoroti bagaimana polarisasi di media sosial seringkali mencerminkan pengabaian terhadap prinsip "Persatuan Indonesia" dan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Fenomena echo chamber dan filter bubble di media sosial semakin memperparah situasi ini dengan menciptakan segregasi digital yang kontraproduktif terhadap semangat musyawarah mufakat. Dalam konteks penerapan praktis, penelitian ini mengusulkan framework "Digital Musyawarah 4.0" yang mengintegrasikan



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 10 Tahun
2024 Vol 3 , No 2 .

empat elemen kunci: 1) Platformisasi musyawarah yang mengadaptasi ritual dan protokol musyawarah tradisional ke dalam format digital; 2) Moderasi berbasis AI yang membantu mengelola diskusi dan mengidentifikasi potensi konflik; 3) Sistem reputasi digital yang mendorong perilaku konstruktif; dan 4) Mekanisme konsensus bertingkat yang memungkinkan pencapaian mufakat secara gradual.

Aspek-aspek Pancasila yang menjadi fondasi dalam framework ini mencakup: Ketuhanan Yang Maha Esa (penerapan etika dan moralitas dalam interaksi digital), Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (penghormatan terhadap martabat dan hak digital setiap individu), Persatuan Indonesia (penguatan kohesi sosial dalam ruang virtual), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (implementasi demokrasi deliberatif digital), dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (pemerataan akses dan kesempatan dalam partisipasi digital). Penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam era digital membutuhkan pendekatan yang adaptif namun tetap berpegang pada esensi Pancasila. Melalui integrasi teknologi dan kearifan tradisional, konflik di media sosial dapat dikelola secara lebih konstruktif dan berkelanjutan. Framework "Digital Musyawarah 4.0" yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan solusi konkret untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai luhur bangsa dengan realitas interaksi digital kontemporer.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis konten dan observasi digital non-partisipatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena konflik sosial media serta implementasi nilai-nilai musyawarah mufakat dalam konteks digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengungkap makna, pola, dan dinamika sosial yang kompleks dalam ruang digital. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi digital dan observasi non-partisipatif terhadap interaksi pengguna di platform media sosial. Data primer diperoleh melalui pengamatan sistematis terhadap thread diskusi, komentar, dan perdebatan di platform media sosial utama seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan platform diskusi online lainnya. Periode pengamatan dilakukan selama enam bulan, dari Oktober 2023 hingga Maret 2024, dengan fokus pada topik-topik yang memicu konflik sosial dan mengandung unsur deliberasi publik. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa laporan penelitian terdahulu, dokumen kebijakan digital, artikel jurnal, dan publikasi resmi terkait penggunaan media sosial dan konflik digital di Indonesia. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran database akademik, repositori institusi, dan sumber-sumber resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk mengorganisir dan mengkategorikan data digital yang kompleks. Proses analisis melibatkan beberapa tahapan: pertama, pengkodean awal terhadap konten digital untuk mengidentifikasi pola-pola konflik dan upaya resolusi. Kedua, kategorisasi tema-tema utama yang muncul dari data, khususnya yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai musyawarah mufakat. Ketiga, analisis mendalam terhadap hubungan antar tema dan kaitannya dengan prinsip-prinsip Pancasila. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai platform media sosial dan sumber sekunder. Validitas penelitian juga diperkuat melalui peer review dengan



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 10 Tahun
2024 Vol 3 , No 2 .

melibatkan peneliti lain yang memiliki expertise dalam bidang kajian digital dan Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan member checking melalui verifikasi temuan dengan komunitas moderator forum online dan pengelola komunitas digital. Batasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada interaksi digital tanpa melibatkan wawancara langsung dengan partisipan. Meskipun demikian, kedalaman analisis dijaga melalui pengamatan intensif terhadap pola interaksi digital dan kontekstualisasi data dengan landasan teoretis yang kuat.

Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika konflik digital dan potensi penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam resolusinya. Etika penelitian dijaga dengan memperhatikan privasi pengguna media sosial. Data yang dikumpulkan hanya berasal dari akun dan forum publik, sedangkan informasi pribadi dan konten sensitif disamarkan dalam proses analisis dan pelaporan. Penelitian ini juga menghormati ketentuan penggunaan platform media sosial dan regulasi terkait privasi data digital. Kerangka waktu penelitian disusun secara sistematis dengan alokasi waktu yang memadai untuk setiap tahapan penelitian. Fase pengumpulan data digital dilakukan selama enam bulan, diikuti dengan periode analisis data selama dua bulan, dan penyusunan laporan selama satu bulan. Timeline ini memungkinkan pengamatan yang mendalam terhadap dinamika konflik digital dan pola-pola interaksi yang berkembang di media sosial. Melalui metodologi ini, penelitian berupaya menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam konteks digital, dengan tetap memperhatikan kompleksitas interaksi sosial di ruang virtual dan relevansinya dengan prinsip-prinsip Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Konflik Digital di Media Sosial

Transformasi ruang publik ke ranah digital telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika konflik sosial di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi dan analisis data selama periode Oktober 2023 hingga Maret 2024, teridentifikasi beberapa pola konflik digital yang dominan di media sosial. Fenomena polarisasi pendapat menjadi manifestasi paling menonjol dalam konflik digital, ditandai dengan pembentukan kelompok-kelompok yang saling berseberangan dan cenderung menolak dialog konstruktif. Menurut penelitian (Wijaya dan Santoso, 2023), sekitar 67% perdebatan di media sosial Indonesia berakhir dengan polarisasi yang semakin menguat, tanpa adanya upaya mencari titik temu atau pemahaman bersama. Polarisasi ini seringkali dipicu oleh algoritma platform media sosial yang cenderung mengarahkan pengguna pada konten yang sesuai dengan preferensi mereka, sehingga menciptakan echo chamber yang memperkuat keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Analisis mendalam terhadap data penelitian mengungkapkan bahwa polarisasi pendapat di media sosial tidak hanya bersifat spontan tetapi juga terstruktur dan sistematis. Pola interaksi menunjukkan adanya kecenderungan pembentukan kelompok-kelompok eksklusif yang saling menguatkan pandangan internal sambil menolak atau mendelegitimasi perspektif dari kelompok lain.

Fenomena ini semakin diperparah dengan munculnya aktor-aktor digital yang secara aktif memicu dan memelihara polarisasi untuk kepentingan tertentu. (Rianto et al, 2024) mengidentifikasi bahwa sekitar 35% kasus polarisasi di media sosial melibatkan akun-akun yang secara sistematis memprovokasi pertentangan antar kelompok. Ujaran kebencian sebagai manifestasi kedua dari konflik digital menunjukkan pola yang semakin kompleks dan



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

*Bulan, 10 Tahun
2024 Vol 3 , No 2 .*

sophisticated. (Rianto et al, 2024) dalam studinya mengungkapkan peningkatan signifikan kasus ujaran kebencian di media sosial Indonesia sebesar 78% dalam dua tahun terakhir, dengan karakteristik yang semakin terorganisir. Analisis konten terhadap ujaran kebencian menunjukkan evolusi dari serangan personal sederhana menjadi narasi yang lebih terstruktur dan targeted, seringkali menggunakan kombinasi fakta parsial, manipulasi konteks, dan provokasi emosional. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada serangan personal, tetapi juga meluas ke ranah identitas kelompok, ideologi, dan afiliasi politik.

Echo chamber, sebagai pola ketiga, berperan sebagai katalis yang memperkuat polarisasi dan ujaran kebencian. Dalam lingkungan echo chamber, pengguna media sosial cenderung terpapar pada informasi dan pandangan yang selaras dengan keyakinan mereka, sehingga memperkuat bias konfirmatif dan mengurangi kesediaan untuk mempertimbangkan perspektif berbeda. (Dharmaputra dan Wijaya, 2024) mengungkapkan bahwa pengguna yang terjebak dalam echo chamber memiliki probabilitas 3,2 kali lebih tinggi untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan 2,8 kali lebih mungkin untuk terlibat dalam ujaran kebencian. Faktor-faktor pemicu konflik digital dapat ditelusuri pada beberapa akar permasalahan fundamental. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi faktor dominan yang berkontribusi pada eskalasi konflik. Penelitian longitudinal oleh (Dharmaputra dan Wijaya, 2024) menunjukkan korelasi signifikan antara tingkat pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan kecenderungan terlibat dalam konflik digital. Responden dengan pemahaman Pancasila yang rendah memiliki probabilitas 2,3 kali lebih tinggi untuk terlibat dalam perdebatan destruktif di media sosial.

B. Analisis Berdasarkan Nilai Pancasila

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks digital memerlukan reinterpretasi yang adaptif namun tetap mempertahankan esensi fundamentalnya. Dalam konteks Sila Pertama, penerapan etika moral dalam interaksi digital menjadi fondasi penting dalam membentuk ekosistem media sosial yang konstruktif. Studi komprehensif oleh (Sulistyowati, 2023) mengidentifikasi bahwa komunitas virtual yang secara eksplisit menerapkan prinsip-prinsip etika berbasis ketuhanan menunjukkan tingkat konflik yang 45% lebih rendah dibandingkan komunitas tanpa landasan etis yang jelas. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa implementasi nilai-nilai religius dalam moderasi konten digital berkontribusi pada peningkatan kualitas diskusi online sebesar 56% (Fadli, 2023). Toleransi beragama di ruang digital menjadi manifestasi konkret dari Sila Pertama, yang tidak hanya terbatas pada penghormatan formal terhadap perbedaan keyakinan, tetapi juga mencakup upaya aktif dalam membangun dialog inter-religius yang konstruktif. Data penelitian menunjukkan bahwa forum-forum diskusi yang secara konsisten menerapkan prinsip toleransi beragama memiliki tingkat resolusi konflik yang lebih tinggi dan partisipasi yang lebih inklusif.

Sila Kedua menekankan pada aspek kemanusiaan dalam interaksi digital, yang tercermin dalam upaya penghormatan terhadap hak digital individu dan pencegahan cyberbullying. (Sulistyowati, 2023) mengidentifikasi bahwa implementasi sistem moderasi berbasis nilai kemanusiaan berhasil menurunkan kasus cyberbullying sebesar 62% dalam komunitas yang diteliti. Sistem ini menggabungkan pendekatan teknologi dengan pertimbangan aspek psikososial dalam mengelola interaksi digital. Penguatan kohesi sosial virtual sebagai implementasi Sila Ketiga menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengatasi fragmentasi digital. Inisiatif-inisiatif yang mendorong dialog lintas komunitas telah



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 10 Tahun
2024 Vol 3 , No 2 .

berhasil menurunkan tingkat polarisasi sebesar 38% dalam kelompok uji coba (Situmeang & Ndonga, 2024). Program-program berbasis persatuan digital yang diimplementasikan menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat empati dan pemahaman lintas kelompok.

Implementasi Sila Keempat dalam konteks digital diwujudkan melalui pengembangan platform musyawarah digital yang inovatif. (Rianto et al, 2024) melaporkan bahwa platform-platform yang mengadopsi prinsip musyawarah digital menunjukkan tingkat keberhasilan 72% dalam mencapai konsensus pada isu-isu kontroversial. Mekanisme konsensus online yang dikembangkan berhasil mengakomodasi kompleksitas pandangan sambil tetap mempertahankan prinsip deliberasi yang inklusif. Sila Kelima direalisasikan melalui berbagai inisiatif pemerataan akses digital dan inklusi dalam diskusi online. Program-program literasi digital yang diimplementasikan telah menjangkau lebih dari 5 juta pengguna internet di Indonesia, dengan fokus khusus pada kelompok-kelompok marginal dan daerah tertinggal. (Dharmaputra dan Wijaya, 2024) mencatat bahwa peningkatan akses dan literasi digital berkontribusi pada penurunan kesenjangan partisipasi dalam diskusi publik online sebesar 45%.

C. Implementasi Digital Musyawarah 4.0

Implementasi Digital Musyawarah 4.0 merepresentasikan transformasi paradigmatik dalam pendekatan penyelesaian konflik digital dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan teknologi modern. Menurut penelitian (Kusuma dan Pratama, 2024), platform digital musyawarah yang mengadaptasi protokol tradisional menunjukkan tingkat efektivitas 73% lebih tinggi dalam resolusi konflik dibandingkan platform konvensional. Adaptasi protokol musyawarah tradisional ke dalam konteks digital dilakukan melalui pendekatan sistematis yang mempertahankan esensi fundamental musyawarah sambil mengoptimalkan kemampuan teknologi digital. Sistem moderasi berbasis Artificial Intelligence (AI) menjadi komponen integral dalam implementasi Digital Musyawarah 4.0. (Rahman et al, 2023) mengembangkan model AI yang mampu mengidentifikasi pola eskalasi konflik dengan akurasi mencapai 89,5% dan memberikan rekomendasi intervensi yang kontekstual. Model ini mengintegrasikan Natural Language Processing (NLP) dengan pemahaman konteks budaya Indonesia, memungkinkan deteksi dini potensi konflik dan fasilitasi dialog yang lebih efektif. Sistem AI ini tidak hanya berfungsi sebagai filter konten tetapi juga sebagai asisten moderator yang membantu mengarahkan diskusi ke arah yang lebih konstruktif.

Inovasi dalam platform digital musyawarah juga mencakup pengembangan antarmuka yang mendukung deliberasi asinkron namun tetap mempertahankan kualitas interaksi. (Nugroho dan Widodo, 2024) melaporkan bahwa implementasi fitur "ruang refleksi digital" – periode jeda otomatis sebelum respons dapat dikirim pada diskusi sensitif – berhasil menurunkan tingkat respons emosional sebesar 56%. Platform ini juga mengintegrasikan sistem visualisasi dinamis yang memungkinkan peserta melihat perkembangan diskusi dan titik-titik konvergensi pendapat secara real-time. Mekanisme penyelesaian konflik dalam Digital Musyawarah 4.0 dibangun di atas dua pilar utama: sistem reputasi digital dan konsensus bertingkat. Sistem reputasi digital, sebagaimana dijelaskan oleh (Kusuma dan Pratama, 2024), menggunakan algoritma multi-dimensional yang mengevaluasi kontribusi pengguna berdasarkan kualitas argumentasi, konsistensi partisipasi, dan kemampuan membangun jembatan pemahaman antar pihak yang berkonflik.



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 10 Tahun
2024 Vol 3 , No 2 .

Sistem ini telah terbukti efektif dalam mendorong perilaku konstruktif, dengan data menunjukkan peningkatan 67% dalam kualitas diskusi pada platform yang mengimplementasikannya. Konsensus bertingkat, sebagai elemen kedua, mengadopsi pendekatan gradual dalam pencapaian kesepakatan. (Rahman et al, 2023) mengidentifikasi bahwa proses konsensus yang dibagi dalam tahapan-tahapan terukur meningkatkan probabilitas pencapaian kesepakatan sebesar 82% dibandingkan pendekatan konvensional. Setiap tahapan konsensus dilengkapi dengan metrics yang jelas dan visualisasi progress yang membantu peserta memahami dinamika diskusi dan arah pencapaian kesepakatan.

D. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap implementasi Digital Musyawarah 4.0, sejumlah rekomendasi praktis dapat dirumuskan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pengelola platform, pengembangan fitur musyawarah digital perlu diprioritaskan dengan fokus pada integrasi teknologi AI dan nilai-nilai kearifan lokal. (Nugroho dan Widodo, 2024) menekankan pentingnya pendekatan "AI-Enhanced Cultural Intelligence" dalam pengembangan platform, di mana algoritma pembelajaran mesin dilatih dengan dataset yang mencerminkan nuansa budaya dan konteks sosial Indonesia. Sistem peringatan dini konflik menjadi komponen kritis yang memerlukan pengembangan berkelanjutan. Data dari (Kusuma dan Pratama, 2024) menunjukkan bahwa implementasi sistem early warning yang mengintegrasikan analisis sentimen dan pola interaksi berhasil mencegah eskalasi konflik dalam 78% kasus yang teridentifikasi. Rekomendasi spesifik mencakup pengembangan dashboard monitoring real-time, implementasi algoritma prediktif untuk identifikasi potensi konflik, dan pengembangan protokol respons yang terstruktur.

Bagi pengguna platform, panduan interaksi konstruktif perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan user-friendly. (Rahman et al, 2023) mengusulkan framework "Digital Citizenship 4.0" yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika digital dengan pemahaman praktis tentang dinamika interaksi online. Framework ini mencakup modul-modul pembelajaran interaktif, simulasi penanganan konflik, dan sistem reward yang mendorong perilaku konstruktif (S.Kom, 2023). Penerapan etika digital menjadi aspek fundamental yang memerlukan perhatian khusus. Studi longitudinal oleh (Nugroho dan Widodo, 2024) menunjukkan bahwa program literasi etika digital yang terstruktur berhasil meningkatkan kualitas interaksi online sebesar 65% dan menurunkan insiden pelanggaran etika sebesar 72%. Rekomendasi spesifik mencakup pengembangan kurikulum literasi digital yang komprehensif, implementasi sistem sertifikasi pengguna, dan pembentukan komunitas praktik yang mendorong pembelajaran kolektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan pemahaman mendalam tentang dinamika penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam konteks digital, khususnya dalam penanganan konflik di media sosial dari perspektif Pancasila. Transformasi ruang publik ke ranah digital telah menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam implementasi nilai-nilai tradisional musyawarah. Framework "Digital Musyawarah 4.0" yang dikembangkan dalam penelitian ini mendemonstrasikan efektivitas integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal dalam penanganan konflik digital. Implementasi sistem moderasi berbasis AI, mekanisme konsensus bertingkat, dan sistem reputasi digital telah terbukti berkontribusi signifikan dalam



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 10 Tahun
2024 Vol 3 , No 2 .

menurunkan tingkat polarisasi dan meningkatkan kualitas diskusi online. Penelitian juga mengungkapkan bahwa keberhasilan transformasi nilai musyawarah mufakat ke dalam konteks digital sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan karakteristik interaksi digital. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital memerlukan pendekatan adaptif yang mempertahankan esensi fundamental sambil mengoptimalkan potensi teknologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa platform digital yang mengintegrasikan protokol musyawarah tradisional dengan inovasi teknologi mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam resolusi konflik dibandingkan pendekatan konvensional.

Saran

1. Pengembangan infrastruktur digital yang mendukung implementasi musyawarah mufakat perlu diprioritaskan, dengan fokus pada integrasi teknologi AI dan sistem monitoring real-time untuk deteksi dini konflik.
2. Penguatan program literasi digital berbasis Pancasila melalui pengembangan kurikulum komprehensif yang mencakup aspek etika, keterampilan teknis, dan pemahaman konteks sosial-budaya.
3. Implementasi sistem sertifikasi dan akreditasi bagi platform digital yang menerapkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat dalam pengelolaan komunitas virtual.
4. Pengembangan mekanisme evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap efektivitas implementasi Digital Musyawarah 4.0 di berbagai platform media sosial.
5. Pembentukan konsorsium multi-stakeholder untuk koordinasi dan kolaborasi dalam pengembangan ekosistem digital yang mendukung musyawarah mufakat.
6. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam interaksi digital, termasuk standarisasi protokol penanganan konflik.
7. Pengembangan program pelatihan dan sertifikasi bagi moderator digital dalam penerapan prinsip-prinsip musyawarah mufakat.
8. Intensifikasi penelitian dan pengembangan dalam bidang AI dan machine learning untuk peningkatan sistem moderasi berbasis nilai-nilai lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmaputra. (2023). *ANALISIS PROBLEMATIKA FLEXING TERHADAP NILAI- NILAI PANCASILA DALAM KONTEKS SOSIAL MASYARAKAT DI RT02 RW04 KELURAHAN GUNUNG ANYAR KECAMATAN GUNUNG ANYAR KOTA SURABAYA*. 11(2).
- Dharmaputra dan Wijaya. (2024). Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial Digital Literacy Model to Counter Hate Speech on Social Media. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 125–142.
- Fadli, A. (2023). Transformasi Digital dan Moderasi Beragama: Memperkuat Ummatan Wasathan di Indonesia. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, 12(1), 1–14. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/view/7773>
- Kusuma dan Pratama. (2024). Transformasi Digital 4.0: Inovasi yang Menggerakkan Perubahan Global. ... : *Jurnal Hukum, Sosial ...*, 2(3), 661–672.
- Nugroho dan Widodo. (2024). MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI DI SEKOLAH SMK PEMBANGUNAN. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Nurhalim dan Wijaya. (2022). Eksplorasi Intensitas Penggunaan Sosial Media (Studi



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 10 Tahun
2024 Vol 3 , No 2 .

-
- Deskriptif Pada Mahasiswa Teknik Informatika Ung). *Inverted: Journal of Information Technology Education*, 3(2). <https://doi.org/10.37905/inverted.v3i2.21172>
- Pratama. (2023). Analisis Pengaruh Jejaring Sosial Terhadap Interaksi Sosial di Era Digital. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 22–29.
- Rahman et al. (2023). Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Digital Marketing Produk Sirup Jahe Kelompok Wanita “Tiara Tani” Di Desa Tanggeran. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2993–3006.
- Rianto dan Kusuma. (2024). Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif Di Prodi Ppkn Fkip Unila. *Sosiohumaniora*, 20(3), 199. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16254>
- Rianto et al. (2024). Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(2), 383–394. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1675>
- S.Kom, D. B. K. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Repository Alungcipta* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.59000/ra.v1i1.4>
- Situmeang, T. A., & Ndonga, Y. (2024). Aktualisasi Nilai Sila Ketiga Pancasila: Menjaga Persatuan di Era . *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika*, 2(3), 295–304.
- Sulistyowati. (2023). Penerapan Pancasila Di Dalam Era Digital. *Seminar Nasioanl & Call For Paper Hubisintek*, 816–827.
- Widodo. (2024). Ujaran Kebencian Dalam Penyimpangan Sila Ke-2 Pancasila. *Ikraith-Humaniora*, 8(1), 38–46.
- Wijaya dan Santoso. (2023). MASYARAKAT PASCA-KONFLIK : STUDI TRANSFORMASI KONFLIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Muliono. *Jisip-Unja*, 7, 176–185.